



STRATEGI PENYIAPAN SDM KEPENDUDUKAN INDONESIA

Oleh: Anindita Dyah Sekarpuri, S.Psi, MSR

Balai Diklat KKB Bogor/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Email : anindita.sekarpuri@yahoo.com

Abstrak

Era Pasar Bebas ASEAN yang dimulai pada tahun 2015 ini akan semakin menitikberatkan penduduk Indonesia sebagai titik sentral dalam pembangunan (*people centered development*) yang dibangun dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana amanat konstitusi negara pada amandemen ke-2 UUD 1945 Pasal 28h Ayat (1) serta Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Disisi lain, pada kenyataannya karena dengan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia menurut data BPS penduduk usia produktif Indonesia yang berstatus bekerja hanya sebesar 109,67 juta. Sedangkan penganggur pada tahun 2011 dengan latar belakang pendidikan tertinggi adalah SMA (BPS, 2011). Rendahnya kualitas manusia Indonesia yang tergambar dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu hal yang perlu menjadi kepedulian bersama karena tanpa adanya peningkatan tingkat pendidikan, kesadaran pentingnya kesehatan dan derajat ekonomi masyarakat Indonesia maka akan sangat sulit bagi SDM Indonesia untuk dapat bertahan dalam persaingan pasar bebas ASEAN. Sesuai hasil proyeksi penduduk oleh BPS untuk tahun 2014-2025, maka diproyeksikan bahwa usia produktif akan membludak terutama kelompok muda (15-49 tahun) ditambah dengan mobilitas tenaga kerja antar negara membuat tantangan kerja semakin berat. Oleh karena itu melalui tulisan ini akan dijabarkan strategi penyiapan SDM Kependudukan sejak dini tentang kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan kepada masyarakat, yang sepenuhnya akan menopang kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat ke depan melalui pendidikan kependudukan secara terus menerus sebagai investasi jangka panjang.

Kata Kunci : SDM, Kependudukan, IPM, *Sustainable Development*, Pasar Bebas ASEAN

A. PENDAHULUAN

Era Pasar Bebas ASEAN yang dimulai pada tahun 2015 ini akan semakin menitikberatkan penduduk Indonesia sebagai titik sentral dalam pembangunan (*people centered development*) yang dibangun dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana amanat konstitusi negara pada amandemen ke-2 UUD 1945 Pasal 28h Ayat (1) serta Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Disisi lain, pada kenyataannya karena dengan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia menurut data BPS penduduk usia produktif

Indonesia yang berstatus bekerja hanya sebesar 109,67 juta. Sedangkan penganggur pada tahun 2011 dengan latar belakang pendidikan tertinggi adalah SMA (BPS, 2011). Kondisi ini menyebabkan tingginya beban ketergantungan yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan pengembangan program ke depan. Khususnya dalam program peningkatan kualitas kehidupan manusia yang tergambar melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Data Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan masih banyaknya penduduk Indonesia yang dianggap tidak berkontribusi secara ekonomi dengan persentase terbesar dalam kategori mengurus rumah tangga (BPS, 2014). Selain makin bertambahnya jumlah penduduk yang diukur melalui Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan angka fertilitas total/*Total Fertility Rate* (TFR) sebagai ukuran besarnya penambahan penduduk karena kelahiran juga perlu adanya kepedulian akan makin banyaknya isu kerusakan lingkungan karena ulah manusia.

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Badan PBB bidang kependudukan juga telah memprediksi bahwa Indonesia akan masuk ke dalam lima negara penyumbang pertumbuhan penduduk terbesar dunia sampai tahun 2050 setelah India, Pakistan, Brazil, dan Nigeria. Kondisi kehidupan masyarakat di kota-kota besar di Indonesia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan banyak negara berkembang lain seperti India. Di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, setiap hari kita bisa menyaksikan kesenjangan sosial, merasakan kemacetan yang luar biasa karena jumlah kendaraan tidak sebanding dengan ruas jalan yang tersedia dan kriminalitas semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Hal ini menjadikan sebuah pekerjaan besar bagi pemerintah dalam menyiapkan SDM kependudukan yang bisa menanggulangi mega tren persoalan kependudukan Indonesia.

B. TUJUAN PENULISAN

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan hasil kajian mengenai penyiapan SDM Kependudukan yang disebabkan adanya keprihatinan akan rendahnya kualitas manusia Indonesia yang tergambar dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu hal yang perlu menjadi kepedulian bersama karena tanpa adanya peningkatan tingkat pendidikan, kesadaran pentingnya kesehatan dan derajat ekonomi masyarakat Indonesia maka akan sangat sulit bagi SDM Indonesia untuk dapat bertahan dalam persaingan pasar bebas ASEAN. Sesuai hasil proyeksi penduduk oleh BPS untuk tahun 2014-2025, maka diproyeksikan bahwa usia produktif akan membludak terutama kelompok muda (15-49 tahun) ditambah dengan mobilitas tenaga kerja antar negara membuat tantangan kerja semakin berat.

Oleh karena itu melalui tulisan ini diharapkan dapat menggambarkan strategi penyiapan SDM Kependudukan sejak dini tentang kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan kepada masyarakat, yang sepenuhnya akan menopang kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat ke depan melalui pendidikan kependudukan secara terus menerus sebagai investasi jangka panjang.

C. KERANGKA TEORI/KONSEP

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas penduduk dan bukan oleh ketersediaan sumberdaya alam dan keberhasilan pembangunan ini merupakan konsekuensi dari pembangunan kependudukan karena penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan (Samosir, 2008) Pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (*people-centered development*), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan penduduk namun saat ini pembangunan belum sepenuhnya berwawasan kependudukan dengan tantangan berupa besarnya kuantitas penduduk yang tergambar dari masih tingginya laju dan jumlah penduduk, struktur penduduk tidak menguntungkan, kepadatan dan persebaran penduduk yang tidak merata (BKKBN, 2012).

Besarnya penduduk akan meningkatkan kebutuhan energi, makanan dan air, yang tanpa upaya teknologi akan berarti terjadi pengurasan besar-besaran terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk tetap harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi beban sosial, ekonomi, politik dan lingkungan.

Gambar 1. Kerangka Berfikir Pembangunan SDM Kependudukan Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan



Dalam skema tersebut diperlihatkan arus logis untuk dapat mencapai pembangunan berkelanjutan yaitu dengan meningkatkan daya saing ekonomi yang dapat tercapai dengan

adanya keseimbangan proporsi antara peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK). Ada 9 bidang yang menjadi sasaran utama dalam ketiga pembangunan tersebut yaitu sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, IPTEK, sarana dan prasarana, politik, pertahanan keamanan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang serta SDA dan Lingkungan Hidup (LH). Kesembilan pembangunan ini tergambar dalam kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam Nawacita Pembangunan Nasional dan dalam melakukan analisis tulisan ini dimulai dengan evaluasi program kependudukan yang telah dilakukan instansi pemerintahan terkait dengan kebijakan pemerintah untuk dapat menyiapkan kondisi perekonomian lebih baik dalam meletakkan dasar pembangunan SDM utamanya dalam bidang kependudukan.

D. METODOLOGI

Pelaksanaan kajian strategi penyiapan SDM Kependudukan melalui studi kajian yang dilakukan di Balai Diklat KKB Bogor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pengkajian dilaksanakan pada pelaksanaan Mata Diklat Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Modul yang dipergunakan adalah modul yang diterbitkan oleh BKKBN sesuai dengan standar Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) dan modul Pendidikan Kependudukan yang menjadi acuan studi kajian ini. Pengkajian menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode analisis isi (*content analysis*) serta metode penelitian lapangan (*field study*) menggunakan eksperimen yaitu dengan menggunakan percobaan di lapangan yaitu kepada peserta diklat yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum (tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat) yang dilaksanakan pada 5 angkatan diklat dengan jumlah responden sebanyak 150 orang.

Menurut Ravers dalam Husein (2004), metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan menurut Newman (2009) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk merekam kejadian sejelas-jelasnya sehingga tidak memerlukan suatu hipotesis karena penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data sebagaimana adanya. Untuk dapat memaknai data maka dilakukan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan makna atas berbagai deskripsi data yang ditemukan dalam suatu penelitian dengan menggunakan metode:

1. Induksi, yaitu kesimpulan yang ditarik dari kejadian yang sifat khusus ke hal yang umum
2. Deduksi, yaitu kesimpulan yang ditarik dari kejadian bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

Kedua metode ini digunakan secara bersama-sama saling melengkapi sehingga diharapkan dapat mendeskripsikan asumsi yang diajukan lewat kerangka berfikir konseptual.

E. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pembahasan kerangka berfikir strategi penyiapan SDM Kependudukan dalam rangka pembangunan berkelanjutan, maka disepakati bahwa dalam pelayanan dasar untuk dapat meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berupa pelayanan pendidikan, kesehatan dan perbaikan kondisi perekonomian bangsa sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas SDM (sebesar 80%) yang menentukan kemajuan bangsa sebagaimana yang disampaikan oleh Samosir (2008). Hal ini bertentangan dengan paradigma umum yang selama ini dijalankan pemerintah yaitu kebijakan pembangunan yang memprioritaskan infrastruktur dan optimalisasi pengolahan SDA.

Pembangunan SDM kependudukan diuntungkan dengan adanya fenomena besarnya proporsi penduduk usia muda dan usia produktif yang berdampak pada menurunnya angka ketergantungan (*dependency ratio*) yang disebut dengan bonus demografi yang terus meningkat. Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi sejak tahun 2000, dan bergerak menuju terbukanya jendela peluang (*windows of opportunity*) di 2020-2030, yaitu Indonesia harus melakukan investasi secara efektif dan efisien dalam SDM, terutama dalam kelompok usia muda untuk dapat menyiapkan prasyarat bonus demografi yaitu ketika rasio ketergantungan pada level yang terendah yaitu 44 per 100 orang usia produktif namun rasio ini akan meningkat lagi sesudah 2030 karena meningkatnya penduduk lansia. Perubahan dalam struktur umur merupakan sebuah kesempatan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi (Moerdianingsih, 2012). Persiapan untuk menyambut momen emas ini harus dimulai dari sekarang dengan memperkuat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi mendorong pertumbuhan ekonomi sebelum rasio ketergantungan meningkat.

Di sisi lain, ternyata globalisasi telah menantang kebijaksanaan konvensional bahwa kekayaan negara bersumber dari peningkatan eksploitasi SDA besar-besaran bukanlah prioritas bagi negara-negara berkembang. Globalisasi adalah proses dimana negara menjadi lebih terintegrasi melalui gerakan barang, modal, tenaga kerja dan ide-ide untuk dapat menghadang masuknya tenaga kerja dari luar wilayah negara tersebut (Thirwall, 2011). Proses ini difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pengaturan ini ide-ide baru yang cepat membawa ke hasil, teknologi baru yang dikembangkan dan digantikan cepat daripada waktu lainnya dalam sejarah. Lebih penting daripada waktu lain di masa lalu, pengetahuan sekarang telah menjadi penentu semakin penting dari kekayaan negara. Pentingnya pengetahuan telah dihidupkan kembali perhatian pada peningkatan kemampuan sistem dan lembaga pendidikan. Proses globalisasi telah membuat lebih maju dan keterampilan khusus yang lebih penting dari sebelumnya, bahkan negara-negara miskin tidak bisa lagi mengabaikan pengembangan pendidikan tinggi. Globalisasi memungkinkan negara melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja mereka untuk melompat ke kurva belajar berkembang tanpa harus menjalani proses yang panjang dan mahal melalui peningkatan penemuan dengan meningkatkan keterampilan dasar melalui pendidikan dan pelatihan.

Untuk negara-negara berkembang prioritasnya adalah untuk menekankan pada primer sebelum pindah ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ada dua tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan kegiatan pengembangan tersebut. Pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan mayoritas penduduk bekerja di industri padat karya terutama ditujukan untuk pasar ekspor, di mana upah jauh lebih tinggi. Tujuan kedua adalah konsekuensi dari yang pertama, dengan memiliki lebih penduduk yang bekerja di sektor pendapatan yang lebih tinggi, kemiskinan akan menurun dan naiknya pendapatan akan memungkinkan sektor lain untuk ikut berkembang juga.

Model pembangunan ekonomi melalui pemantapan SDM kependudukannya telah diterapkan dengan sukses terkenal di negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Taiwan dan telah direplikasi dengan sukses di banyak negara berkembang termasuk Indonesia namun tahap berikutnya dari pembangunan ekonomi terbukti lebih sulit. Cepat atau lambat model pembangunan yang berorientasi ekspor berdasarkan surplus tenaga kerja murah dengan pendidikan dasar akan buang potensinya sebagai kemajuan ekonomi akan mendorong upah dan aspirasi buruh (Thirwall, 2011).

Pendidikan menjadi kunci untuk dapat meningkatkan kualitas SDM Kependudukan, dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja sebagai upaya peningkatan daya saing di era pasar bebas ASEAN 2015 telah dilakukan salah satunya melalui Program Wajib Belajar 9 Tahun (WAJAR) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan kecenderungan pendidikan tenaga kerja Indonesia yang pada tahun 2000 didominasi oleh pendidikan sekolah dasar maka terjadi peningkatan kecenderungan pada pendidikan SMU dan SMK ke atas pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan terhadap program WAJAR tersebut dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja/SDM Indonesia.

Tabel 1: Persentase Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia

Tingkat Pendidikan	2000	2005	2010
Tidak/Belum tamat Sekolah	21.4	15.1	19.8
Sekolah Dasar	36.5	36.2	27.2
Sekolah Menengah Pertama	15.1	19.0	17.7
SMP Kejuruan	1.2	1.9	1.2
Sekolah Menengah Umum	15.3	14.8	16.0
Sekolah Menengah Kejuruan	5.5	7.0	9.1
Diploma 1	1.0	1.0	1.2
Diploma 3	1.4	1.5	1.9
Universitas (S1/S2/S3)	2.6	3.5	5.4

Sumber: SAKERNAS berbagai tahun

Pendidikan formal ini hendaknya dapat diikuti dengan pembangunan karakter individu tersebut karena dengan makin tingginya persaingan tenaga kerja karena adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan APEC pada tahun 2020 akan menimbulkan tingginya kebutuhan tenaga kerja ahli yang tidak hanya terampil namun juga tangguh serta memiliki berbagai karakter positif. Solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja ahli adalah untuk melakukan perekrutan tenaga asing, dengan pindah ke nilai tambah yang lebih tinggi produk yang bisa mempertahankan upah yang lebih tinggi. Beberapa negara seperti Korea Selatan dan Taiwan telah berhasil lulus dari nilai rendah produsen ditambahkan ke produsen nilai produk yang lebih tinggi dengan konten teknologi tinggi. Korea Selatan bahkan telah memulai produk teknologi tinggi dalam elektronik dengan melakukan sistem perlindungan tenaga kerja negara tersebut dari masuknya tenaga asing dengan memberlakukan sistem regulasi tenaga kerja yang jelas.

Indonesia telah berupaya mengantisipasi serbuan tenaga kerja asing dengan memberlakukan berbagai regulasi, salah satunya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 pasal 45 yang menyebutkan setiap tenaga kerja asing wajib melakukan alih teknologi dan alih keahlian serta memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. Setelah berhasil menjalani tahap pertama berorientasi ekspor industrialisasi - Indonesia kini hampir terkunci di spesialisasi nilai tambah rendah produk seperti sepatu-tekstil *low end* dan pakaian dan sebagainya. Situasi ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama sebagai produsen biaya rendah baru seperti Sri Lanka, Vietnam, Kamboja dan sejenisnya sudah mulai memasuki pasar, sementara kebijakan pemerintah serta situasi politik terus mendorong naiknya biaya upah/penggajian tenaga kerja.

Untuk naik tangga untuk produk bernilai tinggi Indonesia harus meningkatkan keterampilan dasar yang tidak terlalu mengandalkan lulusan sekolah dasar-menengah, dan mulai untuk mengeksploitasi kemampuan orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi termasuk lulusan panggilan. Tentu saja, ada banyak masalah melanda sistem pendidikan di Indonesia yang membuat lulusannya kurang kompetitif dibandingkan dengan pesaing terdekatnya seperti Malaysia, Thailand dan Filipina, apalagi Singapura, tapi ini bukan alasan untuk tidak bertindak. Pembangunan SDM Indonesia perlu mendapat prioritas utamanya dalam hal pembangunan karakter dan *soft skill* lainnya yang dipengaruhi oleh berbagai sistem pembangunan SDM Kependudukan sebagaimana tertera pada Gambar 2.

Gambar 2. Sistem Pembangunan SDM Kependudukan



Sumber: Bronfenbrenner, 2004

Pada Gambar 2 diatas oleh Bronfenbenner (2004) disebutkan bahwa dalam rangka pengembangan SDM Kependudukan, maka hendaknya dimulai dari sistem mikro yang ada di sekeliling individu tersebut yaitu orang tua, saudara kandung, 8 fungsi keluarga dan anggota keluarga lainnya di rumah. Sedangkan sistem kedua adalah sistem meso yaitu teman sebaya, tetangga, lingkungan bermasyarakat, posyandu, kelompok bersosialisasi, tempat pendidikan/sekolah dan perlindungan serta pemberdayaan di dalam masyarakat. Sistem ketiga adalah ekso yaitu lingkungan pelayanan sosial dan umum peduli anak, remaja, lansia, tingkat sosial ekonomi serta adanya perlindungan serta pemberdayaan di dalam masyarakat yang lebih luas. Sistem terakhir adalah sistem makro yaitu adanya hukum/regulasi yang kondusif, kebudayaan, norma, agama , adanya jaminan sosial serta pembiayaan yang memadai untuk dapat mengembangkan SDM kependudukan ini. Keempat sistem ini akan saling berinteraksi untuk dapat menghasilkan pergeran paradigma pembangunan yaitu melalui transformasi keluarga menuju pembangunan kesejahteraan berbasis peradaban karena peradaban sebagai modal pembangunan utama. SDM berkualitas merupakan prasyarat modal pembangunan tersebut dan penduduk Indonesia sebagai pelaku/produsen utama dalam pelaksanaan program kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Upaya pembangunan SDM kependudukan dalam mewujudkan SDM berkualitas ini dikatakan berhasil apabila dalam pencapaiannya telah dapat mewujudkan SDM yang berpendidikan (berpengetahuan dan berketerampilan), sejahtera psikologis dan sejahtera ekonomi, serta Sehat (diwujudkan dalam fisik sehat, cukup gizi dan mental tangguh).

E. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa dalam upaya penyiapan:

1. Meningkatkan pengarusutamaan program kependudukan yang terpadu dalam kebijakan dinamis program pembangunan nasional dan daerah
2. Perluasan jangkauan dan pemerataan pelayanan dasar yang berkualitas
3. Mengembangkan dan sosialisasi model pembangunan keluarga
4. Memperkuat kemitraaan strategis dengan stakeholders, Mitra kerja dan penggerakan partisipasi aktif masyarakat.
5. Menyediakan dan penyebarluasan data dan informasi pembangunan SDM kependudukan dan Keluarga berbasis Teknologi Informasi
6. Meningkatkan kapasitas SDM berbasis kompetensi serta penelitian dan pengembangan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga
7. Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan serta meningkatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien

Ke depannya, perkembangan negara akan sangat dipengaruhi oleh sumbangan kualitas SDM kependudukan. Untuk dapat mewujudkan pembangunan SDM Kependudukan yang optimal, maka perlu adanya kerjasama yang harmonis antara keempat sistem pembangunan SDM Kependudukan mulai dari mikro sampai dengan makro.

F. DAFTAR PUSTAKA

Adioetomo, Sri Moertiningsih, et.al. 2010. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2014. *Proyeksi Penduduk Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS;

BKKBN, 2012. *Modul Pendidikan Kependudukan*. Jakarta: BKKBN;

BKKBN, 2014. *Modul Diklat Teknis Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)*. Jakarta: BKKBN;

BPS. 2011. *Tabel Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Provinsi*. Jakarta: BPS. Diakses pada tanggal 13 Juli 2015. Sumber URL:
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=26¬ab=2

BPS. 2015. *Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS)*. Jakarta:BPS;



Bronfenbrenner. 2004. *Making Human Beings Human*. USA:Carlton;

Newman. 2009. *Methodology of Social Research*. New York : Catalyst;

Samosir, Omas Bulan. Strategi Pembangunan Manusia. Artikel Harian Kompas. Tanggal 25 November 2011;

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).2011. *Ulasan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Diakses pada tanggal 19 Juli 2015. Sumber URL : <http://tnp2k.go.id/downloads/viewdownload/27-publikasi-ulasan/115-ulasan-tnp2k-nov-2011-perkembangan-ipm-2011.html>

Thirwall, A.P. 2006. *Growth & Development : With Special Reference to Developing Economies*. New York : Palgrave MacMilan;

UNDP. 2011. *Human Development Reports 2011*. UNDP; Diakses pada tanggal 10 Juli 2015. Sumber URL: http://hdr.undp.org/en/media/FAQs_2011_Human_Development_Report.pdf